



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon (021) 25549000

Jakarta, 12 Mei 2023

Nomor : 247/S/VIII/05/2023

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Bitung TA 2022

Kepada Yth.

Wali Kota Bitung

di

Bitung

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2022, di Bitung. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas objek pemeriksaan dimaksud dengan LHP Nomor 14.A/LHP/XIX.MND/05/2023 dan 14.B/LHP/XIX.MND/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya berdasarkan kerentanan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

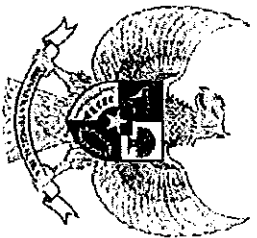
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota,

Dr. Pius Lusitlanang, S.IT., M.Si., CSFA, CFA.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Ketua DPRD Kota Bitung;
3. Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Jenderal BPK;
5. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
6. Inspektur Utama BPK;
7. Kepala Direktorat Utama Renwaja BPK;
8. Sekretaris Daerah Kota Bitung; dan
9. Inspektur Daerah Kota Bitung.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bitung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bitung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bitung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

2024 iii

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

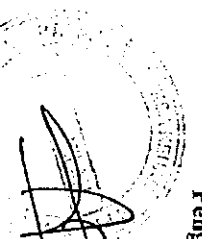

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bitung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Keperuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan keperluan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Keperuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.MND/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Manado, 8 Mei 2023
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Pengendali Teknis,



Ansyé Rombot, S.E., M.M., Ak., CA, ACPA
Register Negara Akuntan No. 15770



PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

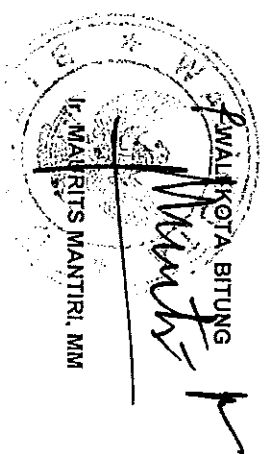
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF KALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	64.336.625.000,00	61.632.405.140,77	95,80	51.201.717.358,35
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.479.959.297,00	3.533.102.900,00	33,71	10.333.404.603,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.819.722.964,00	2.819.722.964,00	100,00	3.268.125.144,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	6.137.590.743,00	9.931.116.344,54	161,81	6.913.660.080,01
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		83.773.897.964,00	77.916.347.349,31	93,01	71.716.907.185,36
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	795.835.457.810,00	786.222.383.818,00	98,79	820.722.600.594,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	32.584.717.026,00	51.818.742.578,00	159,03	34.782.373.703,00
Jumlah Pendapatan Transfer		828.420.174.836,00	838.041.126.396,00	101,16	855.504.974.297,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	41.969.496.925,00	39.788.339.355,00	94,80	26.930.859.278,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		41.969.496.925,00	39.788.339.355,00	94,80	26.930.859.278,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	964.163.669.823,00	955.746.813.100,31	100,17	954.152.639.780,36
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	389.563.947.719,00	360.320.065.988,00	92,49	350.783.480.122,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	428.412.893.317,00	393.816.770.839,44	89,59	280.479.869.560,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	11.941.445.563,00	11.780.606.676,00	98,65	462.600.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	41.417.280.808,00	42.639.394.211,00	102,95	15.490.050.808,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	25.617.276.821,00	14.375.267.584,00	56,12	4.349.800.000,00
Jumlah Belanja Operasi		896.952.844.218,00	812.932.105.298,44	90,63	651.542.700.490,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	21.808.350.000,00	27.093.028.985,00	97,43	3.489.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	53.717.041.217,00	46.440.998.930,00	86,45	46.038.567.215,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	259.104.946.198,00	144.426.547.395,00	55,74	48.551.241.278,00
Belanja Modal Jalan, Jigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	101.640.811.168,00	89.658.711.688,00	88,21	45.397.603.672,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.483.532.745,00	2.409.693.890,00	97,03	1.755.145.600,00
Jumlah Belanja Modal		444.754.681.268,00	310.028.981.358,00	69,71	145.272.457.765,19
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	9.749.179.697,14	8.688.456.905,00	89,12	11.799.606.101,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		9.749.179.697,14	8.688.456.905,00	89,12	11.799.606.101,00
JUMLAH BELANJA		1.361.466.706.183,14	1.131.649.543.561,44	83,74	808.614.764.356,19
TRANSFER	5.1.2.4				
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.361.466.706.183,14	1.131.649.543.561,44	83,74	808.614.764.356,19
SURPLUS / (DEFISIT)		(397.293.135.358,14)	(175.903.730.461,13)	44,28	145.532.872.404,17

[Handwritten Signature]
1

URAIAN	REFE GALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
PEMBAYARAN	5.1.3				
PEREMPUAN PEMBAYARAN	5.1.3.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	212.308.283.358,14	212.308.283.358,14	100,00	7.752.928.612,97
Penerimaan Prigjaman Daerah	5.1.3.1.2	187.484.852.000,00	184.085.390.000,00	98,19	62.500.000.000,00
Penerimaan Kembali Pembehan Prigjaman Daerah	5.1.3.1.3	500.000.000,00	73.574.544,00	14,71	79.579.341,00
Jumlah Penerimaan Pembkayaan		400.293.135.358,14	396.477.247.902,14	99,05	70.332.407.953,97
PENGELUARAN PEMBAYARAN	5.1.3.2				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.619.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Pemanan Lainnya	5.1.3.2.2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	943.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembkayaan		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.562.000.000,00
PEMBAYARAN NETTO	5.1.3.3	387.293.135.358,14	383.477.247.902,14	99,04	68.770.407.953,97
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.4	0,00	271.673.517.441,01	0,00	212.308.283.358,14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



 BUPATI BITUNG
 Ir. M. RITS MANTIRI, MM